

Malang Post Jumat 6 Maret 2019

Tangan di Atas v Wani Piro

SUATU saat, seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam RS pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memberinya. Setelah itu, Hakim meminta untuk kali kedua, Rasulullah pun mengabulkan permintaannya itu. Tidak puas dengan pemberian kedua, Hakim minta untuk kali ketiga. Kali ini Rasulullah bersabda:

"Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini bak buah yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (dan tamak atau atas kerelaan pemilikinya), maka akan diberkahi untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan penuh rasa ambisi (tamak), niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas lebih mulia dibandingkan tangan di bawah (HR. Bukhari 1472 dan Muslim 1035)

Sabda Rasulullah itu kemudian menyadarkan Hakim, bahwa meminta bukan perbuatan yang baik, apalagi yang dilakukan berulang-ulang. Kelanjutan dari riwayat

tersebut, Hakim tidak pernah lagi meminta kepada siapa pun sampai akhir hayatnya. "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta harta seseorang sepeninggalmu hingga aku meninggal dunia."

Bagian akhir dari sabda Rasulullah itu sangat menarik, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksud pernyataan itu adalah, memberi lebih baik daripada meminta. Sabda Rasulullah itu sangat relevan dengan kondisi saat ini ketika banyak orang yang meminta tanpa mau memberi. Ini terjadi di semua golongan masyarakat, dari yang paling rendah sampai yang tinggi.

Pelajaran dari sahabat Hakim bin Hizam RA adalah, setelah dibentah oleh Rasulullah SAW, dia langsung taat. Dia tidak mau meminta lagi. Meskipun ada orang yang memberi, dia tidak mau menerimanya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr 7: "Apa saja yang diperintahkan Rasul maka ketakutlah dan apa saja yang dilarang, tinggalkanlah."

Salah satu larangan Rasulullah adalah meminta,

apalagi yang menjadikan meminta sebagai mata pencaharian. Justru sebaliknya Rasulullah memerintahkan untuk memberi, bahkan tanpa imbalan. Orang yang memberi dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan merasa yakin, karena imbalan yang diharap bukan dari sesama manusia, tapi dari Allah SWT. Mengharap imbalan dari makhluk adalah sesuatu yang belum pasti, tapi imbalan dari Sang Khalik adalah pasti adanya.

Semangat untuk selalu memberi ini perlu digelorkan, sebagai salah satu solusi terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi. Kesulitan personal maupun kolektif bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang dijanjikan Allah, barangsiapa yang suka memberi, bertakwa dan meyakini adanya balasan dari Allah, maka akan diberikan kepadanya kemudahan. Sebaliknya, barangsiapa yang polih, merasa kaya dan tidak yakin kepada balasan Allah, akan diberikan bagusnya berbagai kesulitan.

Dalam konteks kekinian, pada tahun politik ini, memberi menjadi sangat relevan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, pemilik



Oleh:
Husnul Djuraidi
Redaktur Senior Malang Post,
Dosen di UMM

suara perlu memberikannya dengan cara yang bermartabat. Masyarakat sebagai pemilik suara harus memberikannya kepada calon-wakil rakyat dan pemimpin - secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Para calon wakil rakyat dan pemimpin itu adalah orang "fakir" yang membutuhkan bantuan. Mereka harus dibantu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan.

Rasanya agak berat berkampanye mengajak masyarakat memberikan suaranya tanpa imbalan. Di sisi lain, semangat memberi itu

sudah luntur berganti semangat meminta. Kalau sudah memberi harus ada imbalan. Suara yang diberikan harus dihargai dengan nilai materi tertentu. Maka semangat "wani piro" menjadi pedoman masyarakat dalam perilaku politik. Mereka mau memilih tapi harus dibayar dengan jumlah tertentu. Sebenarnya nilai nominalnya tidak terlalu besar, sangat kecil untuk sebuah pilihan penting. Tapi itulah yang kini terjadi, semangat meminta imbalan justru lebih besar dibandingkan semangat memberi.

Tidak ada yang gratis dalam politik. Itulah sebabnya, mengapa politik Indonesia sangat mahal. Dibutuhkan biaya sangat besar untuk bisa menjadi wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Belum ada penelitian spesifik tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi wakil rakyat atau kepala pemerintahan. Meskipun demikian, melihat kecenderungan masyarakat seperti itu, tampaknya butuh biaya sangat besar. Semakin besar tingkatannya, semakin besar biayanya.

Wakil rakyat di DPRI Ri tentu harus mengeluarkan

biaya lebih besar dibanding wakil rakyat tingkat provinsi atau kota dan kabupaten. Itu semua terjadi karena suara yang mereka peroleh harus dibayar dengan imbalan yang tidak sedikit. Pemilu bukan ajang transaksi, tapi ajang rakyat menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Mustahil bisa mendapatkan pemimpin yang baik bila prosesnya diawali dengan cara yang tidak baik.

Aturan formal sudah melarang money politics, tapi dalam praktiknya tetap dilanggar. Aturan dibuat untuk dilanggar. Dalam aturan Allah, minta imbalan atas pemberian, apalagi dengan imbalan yang lebih besar, jelas terlarang seperti firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 6: "Dan janganlah kamu memberi dengan mengharap imbalan yang lebih besar."

Larangan Allah SWT itulah yang kini banyak dilanggar. Mungkin ada yang tidak tahu kalau minta imbalan atas pemberian itu terlarang, tapi ada juga yang tahu tapi tetap saja dilanggar.

Pengetahuan tentang ajaran agama sudah ada, tapi tingkat

ketataan teradap ajaran itu yang minim. Kalau Allah SWT melarang, pasti ada mudaratnya. Secara tidak langsung, masyarakat punya andil dalam terjadinya korupsi. Untuk bisa menjadi kepala pemerintahan dan wakil rakyat, ternyata dibutuhkan biaya sangat besar. Pengeluaran terbesar untuk membeli suara para pengikut "wani piro".

Maka hukum dagang pun berlaku. Uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu itu harus dihitung dan harus kembali. Penghasilan resmi tentu tidak akan mampu mengembalikan uangnya dalam satu periode. Padahal, saat menjabat itu banyak peluang untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Inilah cara yang ditempuh, korupsi untuk balik modal.

Di sisi lain, masyarakat bisa ikut berpartisipasi memberantas korupsi. Salah satunya dengan memilih calon tanpa harus dengan imbalan. Pilih sesuai hati nurani. Kalau ada yang menawarkan uang agar memilih calon tertentu, tolak saja. Itulah langkah kecil dalam upaya memberantas korupsi sejak awal. Bismillah. (*)